

## **Kemunduran dan Keruntuhan Ekonomi Muslim Pribumi di Indonesia**

**Herdi Sahrasad, Ma'mun Murod Al-Barbasy**

[murod@gmail.com](mailto:murod@gmail.com)

**Abstract:** *The article describes about business circles and the middle class of indigenous Muslims who want the duo of President Jokowi-Jusuf Kalla (Vice President), who replaces SBY-Boediono today, can firmly and quickly put an end to social crime practices, especially how to eradicate corruption, law enforcement, community empowerment, for the sake of justice, humanity, freedom, human rights, and democracy. The Muslim communities want that in this reform era, Jokowi-JK program is accompanied by a "clear and clear policy of vision" that can help people out of the economic crisis, social destruction and disintegration symptoms. During the transitional period of the Habibie era, Abdurrahman Wahid, Megawati-Hamzah Haz and SBY-Boediono and Jokowi-JK today, the discourse is still "separate" from the reality of socio-economic and cultural life of the people who are suffering and depressed by multi-crisis. As a result, the politics of the current regime that relies on discourse, does not have a socio-economic machine to realize that discourse as a social idea that can be implemented in real terms by the people, and consequently only becomes "political consumption" and the commodities of the elites and the middle class are separated from social processes in the undercurrent. In this case, the government must realize that by allowing poverty and injustice to be rampant among Muslims that is similar with waiting for the time bomb for explosions of anger and violence.*

**Kata Kunci:** *Muslim; ekonomi; kelas menengah; kapitalisme*

### **Pendahuluan**

Dalam penelitian sosialnya di Mojokuto tahun 1950-an untuk studi agama Jawa, Clifford Geertz, antropolog terkemuka di Universitas Princeton, AS mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan Islam berjalan secara beriringan. Geertz lebih lanjut mengungkapkan bahwa

“Dalam kerangka teori Max Weber tentang peran Protestanisme dalam menstimulasi pertumbuhan komunitas bisnis di Barat, bahwasanya para pemimpin komunitas bisnis di Mojokuto adalah sebagian besar Muslim reformis-puritan (Muhammadiyah-Masyumi-penulis).”

Geertz memang menemukan sebagian besar tokoh dan pemimpin usaha bisnis tembakau, tekstil, sejumlah toko dan perusahaan justru didominasi Muslim reformis puritan kalangan Masyumi. “Tujuh dari pertokoan modern yang berdiri di Mojokuto, enam di antaranya dijalankan oleh Muslim reformis-puritan,” kata Geertz (Peddlers and Princes, 1963). Kesimpulan Geertz soal saudagar Muslim ini mirip antara pertumbuhan kapitalisme dengan Reformasi Protestan di kalangan Calvinis.

Sebenarnya, jauh sebelum kolonialisme datang ke Asia Tenggara, kaum saudagar Muslim telah menikmati abad perniagaan yang cerah dan merupakan pembawa salah satu tradisi merkantilisme terbesar di dunia yang membanggakan. Namun pada abad KE-17 dan 18 di bawah pengaruh gabungan kolonialisme Eropa dan para penguasa absolut, tradisi merkantilisme itu telah hancur. (Hefner, 2000)

Di Indonesia pasca Soekarno, dalam perkembangan selanjutnya, kita tahu bahwa di zaman orde Soeharto kembali lagi, tragedi terhadap borjuasi Islam pribumi terjadi: golongan bisnis Muslim itu umumnya tersingkir dan termarginalisasi oleh ekonomi kapitalisme Orde Baru yang didominasi modal asing, golongan kapitalis Tionghoa (Cina perantauan) dan kroni Cendana. Tulisan di bawah ini mencoba menguraikan bagaimana kaum pengusaha Muslim (pribumi) itu secara perlahan tapi pasti, telah tersingkir dan tersungkur di panggung ekonomi nasional seperti sebuah absurditas tragedi.

### **Ekonomi Dualistis**

Dengan melihat bagaimana sejarah ekonomi Indonesia—karena sangat luasnya cakupan sejarah modern Indonesia—maka untuk riset monograf ini, hanya sejarah ekonomi pada masa Orde Baru saja yang menjadi fokus perhatian studi ekonomi-politik era Soeharto, di mana marginalisasi dan deprivasi sosial-ekonomi Muslim sangat dahsyat, dengan melihat struktur (structure), kebijakan dan perencanaan (policy and planning), dan kinerja (performance) ekonomi Orde Baru di bawah Soeharto.

Yang harus dipahami, sifat pokok dari perekonomian Indonesia sebagai negara sedang berkembang adalah “ekonomi dualistis”, yaitu industri ekspor yang terpadu dengan perekonomian dunia, yang sudah menggunakan sistem modern, dan di samping itu ada kegiatan-kegiatan yang masih mempunyai tingkat subsistem (pertanian tradisional dan kerajinan). Kedua sektor kegiatan ini memproduksi barang-barang untuk pasar lokal dan terpisah dari perekonomian pasar modern. Sebagian besar golongan Muslim berkiprah dalam usaha kecil-menengah jenis ekonomi bazaar tersebut, sebagaimana yang ditemukan oleh Geertz di Mojokuto.

Adapun asal mula ekonomi dualistis ini tidak terlepas dari adanya perluasan pasar yang dilakukan oleh negara-negara industrialis-merkantilis pada akhir abad KE-19 dalam suatu kolonisasi. Kecuali Jepang yang sekarang ini telah menjadi negara industri, seluruh Asia, Afrika, dan Amerika Latin pada masa lalu merupakan daerah koloni dari negara-negara Barat/AS yang mula-mula mereka peruntukkan untuk berdagang, tetapi kemudian semakin memperluas daerah kekuasaan ekonominya. Kondisi ini diperparah dengan penguasaan modal dan teknologi di tangan negara- negara kolonial modern tersebut.

Seluruh aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara kolonial yang sudah maju itu terhadap negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, tidak terlepas dari pengaruh ekonomi kapitalisme konvensional yang saat itu begitu dominan diterapkan. Demikian halnya yang terjadi di Indonesia.

Berbeda dengan ekonomi kolonial yang terbelah antara sektor modern dan sektor tradisional, dan di mana Pemerintah Kolonial Belanda hanya melihat Indonesia tidak lebih hanya sebagai sumber bahan mentah murah dan berlimpah untuk kebutuhan industri di Belanda, dan pola ini terus berlangsung hingga dasawarsa 1950-an, maka pembangunan ekonomi Indonesia boleh dikatakan baru dimulai pada dasawarsa 1960-AN (Kuntjoro-Jakti, 2000). Pada periode 1950-AN, berbagai kebijakan ekonomi yang pernah diambil ikut menentukan aktivitas pembangunan ekonomi di negeri ini, mulai dari “Politik Banteng”, “Politik Integrasi”, hingga “Ekonomi Kerakyatan” belum sepenuhnya dapat mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. “Politik Banteng” di zaman kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Nasir dengan Menteri Perdagangan Sumitro Djojohadikusumo, ternyata malah menimbulkan praktik perkoncoan yang disebut “Pengusaha Ali-Baba”, “Pengusaha Konco” yang justru menguntungkan segelintir orang saja, yakni pengusaha

keturunan Cina (Damanhuri, 2000). Dalam perkembangannya sempat muncul segelintir pengusaha Muslim dalam periode ini. Namun krisis politik dan kejatuhan Soekarno 1965-66 menimbulkan kemunduran ekonomi wirausahawan Muslim tersebut.

Pada tahun 1960-an dan terutama pada masa Soeharto berkuasa, industrialisasi dilakukan dengan luas dan gempita dengan pembukaan pintu bagi partisipasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Indonesia masa Orde Baru sangat ditentukan oleh rezim Soeharto dan gaya pemerintahannya. Orde Baru di bawah Soeharto memulai langkah ekonominya dengan memobilisasi intelektual yang berasal dari kalangan ekonom yang dikenal sebagai teknokrat untuk menarik modal asing.

Meskipun sebetulnya kebijakan ekonomi (economic policy) Indonesia sudah dimulai sejak Pemerintah kolonial Belanda membentuk Departemen Urusan Ekonomi di Hindia Belanda pada 1934, tapi itu tidak dimaksudkan untuk perumusan kebijakan —apalagi perencanaan— ekonomi. Baru setelah di bawah kekuasaan Soeharto-lah, perencanaan ekonomi serius dilakukan yang bukan hanya untuk sekedar menghadapi krisis di masa Orde Lama, tapi lebih kepada upaya penyempurnaan kebijakan (perencanaan dan program) ekonomi (Kuntjoro-Jakti, 2000). Sebagaimana ditunjukkan oleh Lindblad (2000), kebijakan ekonomi (khususnya kebijakan industri dan pembangunan) untuk meningkatkan daya-beli (purchasing power) dan kesejahteraan masyarakat Indonesia lebih terfokus di Jawa. Wilayah Luar Jawa, meski baru diperhatikan pada akhir masa kekuasaan Soeharto, kurang menampakkan adanya keterkaitan antara perubahan demografis dengan kapasitas ekspornya. Artinya, sejarah ekonomi masa Orde Baru di bawah Soeharto adalah kelanjutan dan perubahan dari kebijakan ekonomi kolonial Belanda, dengan para teknokrat, borjuasi Tionghoa dan modal asing sebagai prime mover pertumbuhan ekonomi.

Soeharto yang secara kultural berwatak abangan-priyayi, diam-diam menyimpan kecurigaan dan kekhawatiran terhadap golongan Muslim pribumi yang umunya berhimpun dalam Partai Masyumi. Sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi-politiknya memihak kepada kekuatan abangan, Tionghoa dan non-Islam dan sebaliknya, bersifat kontra dan detrimental terhadap Muslim pribumi. Dalam hal politik, seperti telaah Allan Samson (1968), Soeharto juga menolak bangkit kembalinya politisi Masyumi dalam partai yang baru yakni Parmusi. Karakter Islamo-phobia ala Soeharto itu terus berlanjut sampai kurun tahun 1990-an yang kelak ditandai lahirnya ICMI.

Namun, bagaimanapun sejarah ekonomi Indonesia sudah memperlihatkan bahwa ekonomi yang dulu muncul karena eksploitasi berkepanjangan imperialisme Belanda, lalu karena upaya mobilisasi logistik perang Tentara Pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II, selanjutnya karena Perang Kemerdekaan (1945-1949) yang disusul periode pergolakan politik 1949- 1966 di mana modal swasta domestik (domestic private capital) gagal terbentuk (Robison, 1986: 36-68) meski telah mendapatkan sejumlah konsesi dari nasionalisasi perusahaan asing, maka praktis hanya sejak Pelita.

I (1969-1974) Indonesia mulai mengalami stabilitas ekonomi dan selanjutnya mengupayakan adanya pembangunan yang digerakkan oleh dan untuk kepentingan kemakmuran bangsa Indonesia sendiri. Maka modernisasi pun terjadi di segala bidang dan transformasi masyarakat dari yang agraris ke masyarakat industrial pun terwujud di bawah komando Soeharto. (Booth & McCawly, 1982: viii)

Dalam berjibaku memperbaiki ekonomi Indonesia pasca Pemerintah Soekarno, Orde Baru menetapkan Industrialisasi Substitusi Impor (ISI) untuk menggerakkan pembangunan di Indonesia. Misi ini nampaknya membuahkan hasil optimal dengan berdatangnya negara-

negara maju untuk mengalirkan utang luar negeri berbunga lunak dengan jangka pengembalian yang panjang. Semua itu untuk keperluan pembangunan ekonomi secara berkesinambungan. Dalam catatan Dawam Rahardjo, selama Pelita I, rata-rata bantuan luar negeri yang dipakai mencakup 70,7% dari anggaran pembangunan (Mubyarto, ed. 1981). Dalam pandangan Mochtar Mas'ood (1989) rezim Orde Baru telah memilih strategi ekonomi konvensional dengan strategi stabilisasi dan pembangunan ekonomi yang "berorientasi ke luar". Memang, dengan strategi ini Orde Baru berhasil menstabilkan perekonomian bahkan mampu menarik cukup banyak bantuan asing sehingga memungkinkan pemerintah untuk mengurangi defisit APBN secara drastis. (Sudjana, 2004)

Kemudian pemerintah mengendalikan tingkat inflasi dari 600% lebih pada akhir tahun 1966 menjadi 15% dua tahun kemudian. Namun, strategi ekonomi yang "berorientasi ke luar" ini mengharuskan berbagai penyesuaian yang tidak menguntungkan bagi rakyat. Program stabilisasi yang drastis (yakni APBN) berimbang, kredit ketat, penyesuaian harga, dan lain-lain) mengakibatkan kenaikan harga yang luar biasa hampir pada setiap jenis barang dan jasa serta kemacetan sektor-sektor produktif selama periode 1967/1968.

Studi Mochtar Mas'ood melukiskan bagaimana rezim Orde Baru yang "militokratis", dipimpin oleh militer sebagai suatu lembaga bekerjasama dengan para "teknokrat" sipil dan modal asing. Selama periode 1966-1971, rezim Orde Baru dipimpin oleh Angkatan Darat, sebagai inti lembaga militer. Sampai pertengahan 1970-an, Departemen Pertahanan dan Keamanan (Hankam) mempunyai peranan yang dominan dan menentukan dalam proses politik.

"Politik Integrasi" Orde Baru yang berkelimpahan dana hutang luar negeri, PMA (penanaman modal asing) dan rezeki Migas (minyak bumi dan gas) hanya bisa dimanfaatkan pengusaha keturunan Cina akibat praktik birokrasi yang tidak sehat. Kebijakan ekonomi Orde Baru secara sadar atau tidak sadar telah memberikan peluang dan menyuburkan konglomerasi dan kompradorisasi.

Pemerintah Orde Baru juga mengizinkan beberapa pengusaha (tipe birokrat, klien maupun Cina) mendominasi perekonomian Indonesia selama Orde Baru. Didukung oleh hak-hak khusus yang diberikan oleh pemerintah, para wiraswastawan tersebut mengendalikan setiap sektor utama perekonomian Indonesia. Lebih dari itu, hubungan khusus mereka dengan negara membuat menarik para investor asing yang menjalankan usaha di Indonesia dan mudah menciptakan kerja sama dengan kapitalis internasional dalam bentuk proyek patungan. Secara bertahap, terbentuklah hubungan segitiga "negara-kapital-internasional-usahawan domestik" di Indonesia (Mas'ood, 1989). Pandangan ini paralel dengan Adi Sasono & Sritua Arif (1984), bahwa proses modernisasi yang terjadi biasanya berlangsung karena adanya jaringan kerjasama antara elite lokal dan elite luar, baik yang memiliki modal maupun kekuasaan. Dalam kerjasama inilah muncul suatu kelas yang disebut dengan "kelas komprador", yakni sebuah jalinan kerjasama antara elite luar dengan elite lokal yang memiliki kekuasaan demi menjaga kelangsungan investasi para pemilik modal. (Sasono & Arief, 1984) Kompradorisasi atau upaya pelancaran dan perlindungan terhadap modal dari luar oleh elite yang berkuasa merupakan salah satu gejala yang muncul akibat terjadinya aktivitas pembangunan ekonomi yang tidak fungsional (dysfunctional activity development) akibat pengaruh pembangunan ekonomi konvensional. Gejala lain yang juga muncul adalah konglomerasi dan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam proses modernisasi yang menggunakan pendekatan ekonomi konvensional kelas komprador seringkali hadir akibat budaya politik dan kultur birokrasi yang melindungi para pemilik



modal demi sebuah pembangunan yang seringkali merugikan masyarakat domestik dan lingkungan hidup. Kehadiran kaum komprador ini tidak jauh berbeda dengan kehadiran konglomerat, “pengusaha Ali-Baba” di masa Orde Lama.

Dalam konteks ini, Didin Damanhuri (1996) menjelaskan bahwa ihwal konglomerasi dalam struktur ekonomi nasional tak terlepas dari unsur yang disengaja (by plan) maupun unsur yang tak sengaja (by chance) selama perjalanan dari pola PJP (Pembangunan Jangka Panjang) I (1964 – 1994). Disebut secara sengaja, karena alasan hampir satu-satunya pada masa awal Orde Baru—karena keterbatasan pemerintah kala itu—maka tesisnya adalah ‘siapa yang paling siap’ maka kepada merekalah diberikan berbagai fasilitas, yakni berupa kemudahan kredit, lisensi impor, perlindungan tarif dan non tarif, subsidi, monopoli, dan seterusnya. Dalam kondisi demikian, maka akhirnya kita menyaksikan lahirnya 200-300 konglomerat yang sama sekali tidak ditopang oleh lapisan pelaku menengah yang memadai di bawahnya.

Dan menjelang Orde Baru Soeharto tumbang, sekitar 4 persen etnis Tionghoa ternyata menguasai 70 persen aset ekonomi nasional dan lebih dari 70 persen kredit perbankan nasional, suatu angka yang jauh sangat tinggi dibandingkan kepemilikan kapital oleh pribumi Muslim yang merupakan 88 persen rakyat Indonesia, dalam mana hanya menguasai usaha kecil-menengah dan sektor informal yang marginal. Sampai era reformasi Susilo Bambang Yudhoyono- Jusuf Kalla dewasa ini, ketimpangan antara aset Muslim pribumi dan golongan pengusaha Tionghoa (nonpri) tidaklah berubah. Bahkan marginalisasi ekonomi Muslim kian deras dan mengeras. Ditambah lagi diteruskannya kebijakan neo-liberalisme dalam perekonomian kita, telah semakin membuat golongan menengah ke bawah semakin miskin dan terpuruk. Meminjam perspektif Robert Hefner (2000), bagi kaum Muslim nyaris tidak ada keadilan di dalam ekonomi pasar liberal yang berlaku kejam itu.

Karena itu, kalangan Muslim dan non-Muslim pun bertanya: “Apakah kita masih percaya bahwa pemerintah merupakan penguasa riil atas masyarakat, bila 15 keluarga menguasai 61,7 persen kapitalisasi pasar di Indonesia, dan sedikitnya 71,5 persen perusahaan go public dikuasai oleh keluarga (Claessens, dkk 1999)?” Ini ditambah lagi dengan skandal BLBI Rp650 triliun dan beban utang luar negeri US\$150 milyar yang membebani rakyat begitu berat. (Priyono, 2002)

### **Mitos Pembangunan**

Mitos “keberhasilan” pembangunan ekonomi di Indonesia yang selalu ditandai dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan harapan terhadap ‘tetesan ke bawah (trickle down effect)’ ternyata dalam kenyataannya tidak mampu mensejahterakan rakyat kebanyakan, bahkan memarginalisasi kewirausahaan Muslim. Aktivitas pembangunan ekonomi yang dipilih oleh Orde Baru, yakni liberalisme ekonomi terbukti menghasilkan tingkat kesenjangan yang tinggi. Selain itu, aktivitas pembangunan ekonomi yang dipilih Orde Baru cenderung menciptakan praktik-praktik penyimpangan ekonomi, seperti KKN, “kompradorisasi”, kalangan penguasa parasit dan sejenisnya. Aktivitas pembangunan ekonomi seperti ini terkategori sebagai model pembangunan konvensional, lawan dari model pembangunan fungsional.

Kebijakan ekonomi Orde Baru dengan pendekatan ekonomi konvensional secara sadar maupun tidak sadar, telah memberikan peluang kepada hanya 200 orang pelaku konglomerat yang sebelum krisis menguasai sekitar 76% aset atau sekitar 62% omzet ekonomi nasional. Kondisi ini bisa terjadi karena proses trade off, yakni terjadinya alokasi sebagian besar

sumber-sumber daya nasional baik sumber finansial (anggaran pusat dan daerah, kredit perbankan, proyek-proyek PMA, dan dana yang berasal dari utang luar negeri) maupun lainnya (manajemen, teknologi, informasi, lahan, SDM) terhadap para pelaku big business dan bersifat mega-proyek. Sementara itu para pelaku yang lain, yakni sekitar 99,8% mengalami mis- alokasi dan dislokasi sumberdaya nasional (Damanhuri, 2000).

Penguasaan segelintir kalangan usaha terhadap aset perekonomian nasional bisa terjadi di mana salah satunya melalui proses kompradorisasi, yakni upaya pelancaran dan perlindungan terhadap modal dari luar oleh elite yang berkuasa, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Jadi, dalam hal ini terdapat praktik “kongkalikong” atau kolusi di antara para pejabat berwenang dengan pada pengusaha “nakal” untuk mengeksploitasi sumberdaya alam secara ilegal atau seolah-olah legal dengan memanfaatkan potensi lokal atau rakyat kecil. Praktik perekonomian semacam ini termasuk pada kategori aktivitas pembangunan yang disfungsi.

Dalam hal ini Richard Robinson (1986) melihat bahwa kelas kapitalis (baca: klien) sangat tergantung kepada penguasa (patron) karena penguasa itulah yang memberikan berbagai fasilitas seperti proteksi, subsidi, serta terciptanya struktur pasar yang monopolistik dan oligopolistik yang sangat menguntungkan pengusaha atau kelas kapitalis tersebut. Merebaklah kaum kapitalis birokrat. Sementara itu, keuntungan yang dinikmati penguasa adalah berupa imbalan atau rente dari kelas kapitalis. Inilah yang oleh Arief Budiman (1995) disebut dengan “negara otoriter birokratik rente”, yang juga sekaligus negara kaum komprador, yang jelas memarginalisasi pengusaha Muslim pribumi.

Secara umum gejala kompradorisasi bisa diistilahkan dengan politik “kaki tangan”. Dalam hal ini, seperti kasus Batam, para “pengusaha bermasalah” yang biasanya adalah pengusaha lokal bekerjasama atau menjadi “kaki tangan” para pemilik modal yang biasanya merupakan para kapitalis luar daerah. Kerjasama antara pemilik modal dari luar dengan “kaki tangannya” yakni pengusaha lokal lalu dilindungi oleh para aparat dari berbagai instansi dan tingkatan yang memudahkan setiap kegiatan ekonomi mereka meskipun sering melanggar aturan dan hukum yang berlaku, namun kaum komprador ini tetap lancar dan mendapatkan perlindungan. (Sudjana, 2004) Dalam hal ini, Kamarsyah (2003) melihat bahwa birokrasi juga telah meminggirkan ekonomi Islam, dalam pengertian bahwa kaum borjuasi pribumi (Muslim) nyaris disingkirkan total dari proses pembangunan karena berbagai hal. Ia mengemukakan 6 (enam) hal kondisi aktual birokrasi nasional yang selama ini berada pada proporsi yang tidak aspiratif terhadap umat Islam, yaitu (1) Birokrasi pemerintah sangat sentralistis dan cenderung melakukan praktik korupsi-kolusi-nepotisme (KKN); (2) Segala urusan yang berhadapan dengan birokrasi selalu berbuntut uang, sehingga sering disebut “predatory bureaucracy”; (3) Bentuk kelembagaannya sangat besar (big government) dan serba pemerintah; (4) Setiap instansi selalu memperjuangkan kenaikan anggaran setiap tahun (acapkali mengesampingkan target fungsional) karena kenaikan anggaran tersebut berkorelasi positif dengan keberhasilan pimpinan instansi; (5) Lembaga birokrasi kurang efektif dan kurang melayani kepentingan publik; (6) Selama 32 tahun berada di bawah bayang-bayang “single majority”, di mana birokrasi pemerintahan tidak berkesempatan membangun dirinya, sehingga tidak peka terhadap lingkungannya dan gagal dalam merespons perubahan.

Tata pemerintahan yang buruk (bad governance) serta mental para pengambil keputusan (policy maker) yang buruk ikut memperlancar terjadinya proses kompradorisasi dan

sejenisnya, yang kian memarginalkan Muslim pribumi. Kondisi ini sudah pasti tidak memungkinkan terselenggaranya proses perumusan kebijakan lingkungan yang akomodatif dan partisipatif, sehingga berkonsekuensi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Iklim birokrasi yang dicemari budaya sungkan, KKN, dan by pass, makin mempersulit terciptanya struktur hubungan egaliter seharusnya menjadi potensi luar biasa untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan bangsa Indonesia hanya dapat dinikmati oleh segelintir elite rezim dan kroninya saja. Ekonomi rakyat yang mayoritas Muslim akhirnya terpinggirkan, mengalami marginalisasi dan deprivasi sosial-ekonomi secara terus menerus. Hal ini akhirnya berkonsekuensi menimbulkan berbagai masalah sosial, politik, dan kultural.

Pembangunan yang semula mengandalkan modal asing, oleh Soeharto mulai digeser dengan kebijakan-kebijakan kolusif, proteksi yang berlebihan dan nepotis yang hendak memunculkan kaum pemodal domestik yang kuat dari kalangan militer, keluarga Cendana, kelompok Astra, Kelompok Liem, kelompok Soedarpo, kelompok Sultan Hamengku Buwono, dan kelompok Sutowo. Akibatnya, muncul benih-benih kolusi dan nepotisme di dalam pemerintahan Soeharto, selain korupsi yang sudah sejak awal sulit diberantas. Penggunaan barang-barang impor dalam program stabilisasi telah menyingkirkan barang-barang produksi dalam negeri dari pasar, dan pada gilirannya menyebabkan banyak kebangkrutan dalam masyarakat bisnis Muslim pribumi.

Dengan demikian, secara ringkas dapat dikatakan bahwa kapasitas negara untuk mengelola urusan bersama dan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat banyak, termasuk golongan Muslim pribumi, sesungguhnya telah dilucuti oleh kepentingan privat kelompok-kelompok bisnis kuat tertentu, melalui kolusi, korupsi dan nepotisme di dalam iklim yang mendukungnya. Kesemuanya ini akhirnya menjadi awal krisis-krisis berkepanjangan di rezim Orde Baru yang mencapai klimaks pada krisis moneter di tahun 1997 dan akhirnya pada tahun 1998 mengakibatkan tumbanganya rezim Orde Baru tersebut. (Robison, 1992)

Beberapa faktor utama yang bersifat politik inilah, selain ada beberapa faktor tambahan lainnya, yang menjadi penyebab munculnya krisis ekonomi Indonesia pada 1997 yang parah (deep crisis) setelah Indonesia mencapai beberapa dekade pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, serta pengurangan kemiskinan. Indonesia kemudian terpuruk dalam krisis ekonomi yang tragis dan berkepanjangan, dan belum bisa bangkit dan keluar dari krisis.

### **ICMI, Priyayi Santeri dan Kapitalisme Orde Baru**

Setelah berhasil sepenuhnya merangkul kaum abangan, priyayi dan nasionalis (pluralis), Orde Baru Soeharto pada 1990-an lebih memilih rekanan Islam-nya dari kalangan yang lebih moderat yang berbasis di kelas menengah. Kalangan radikal, baik yang terdapat di kubu fundamentalisme ataupun transformisme Islam tidak tersentuh oleh birokratisasi. Oleh karena itu Orde Baru Soeharto memilih birokrat Muslim sebagai partner-nya tatkala rezim Soeharto ini butuh kekuatan pengimbang terhadap dominasi kapitalis Cina dan kelompok Benny Murdani. Dalam hal ini, kelahiran ICMI bisa dilihat dalam konteks politik tadi. Dalam hal ini, apa yang dikatakan Aswab Mahasin (1994) sebagai priyayisasi santri, nampaknya hanya terjadi di kalangan kelas menengah Muslim dari jenis bildungburgertum, yang menjadi tiang penyangga ICMI yang tidaklah homogen karena berbagai faksi di dalamnya: birokrat, intelektual transformis dan pebisnis. Apakah mereka mampu mempengaruhi terjadinya perubahan "ekologi moral" seperti yang diinginkan Kuntowijoyo (1989)? Masih merupakan tanda tanya besar!

Apa yang lebih penting adalah bahwa dengan preferensi yang diambil Orde Baru ini maka wacana Islam politik yang dominan tampaknya datang dari jenis yang lebih elitis. Kelas menengah bildungburgertum sendiri merupakan suatu jenis yang hampir-hampir tak punya preseden di kalangan santri. Jenis ini sepenuhnya merupakan produk Orde Baru. Kalangan santri lama yang berbasis pada “kapitalisme merkantilis dan ekonomi bazaar” benar-benar sudah punah. Penggantinya, kelas bildungburgenum itu—suatu kategori kelas menengah dari khazanah Jerman pada abad KE-19 yang karena keterpelajarannya menempati posisi di birokrasi—memang hanya bisa berpatronase dengan birokrasi.

Patronase dengan birokrasi inilah isu yang memang sangat kontroversial di kalangan gerakan pro- demokrasi di Indonesia saat ini. Khususnya di kalangan yang dikategorikan Uhlir sebagai "radikal", perilaku patronase merupakan perilaku yang dikecam. Dan mereka melihat Islam-politik seperti yang ditampilkan ICMI dengan sikap seperti itu. Dan sebagaimana terbukti belakangan, kecaman terhadap ICMI ini rupanya bukan sekadar pada aspek patronase politik. ICMI juga dianggap membawa kembali ruang agama ke dalam arena politik. Ini merupakan "dosa" ICMI yang jauh lebih besar di mata hampir semua kelompok pro-demokrasi "konvensional", bukan hanya di mata faksi radikal tetapi juga bagi faksi konservatif dan moderat.

Kalangan ICMI di kalangan pengusaha Muslim pribumi diharapkan menjadi kekuatan yang memihak golongan Muslim yang secara ekonomi kian marginal di bawah Orba Soeharto serta, selalu terancam oleh kapitalisme Cina dan modal asing, suatu masalah peka yang mengantui politik ekonomi Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Di mata pengusaha Islam reformis-puritan, kaum kapitalis Cina biasa dianggap kaum sekular dan binatang ekonomi. (Sahasrad, 1996)

Karena itu, ketika Deklarasi Jimbaran zaman Soeharto, di mana para pengusaha Cina merupakan tulang punggungnya, dicetuskan beberapa waktu lalu, debat publik yang diwarnai pro-kontra tak terelakkan. Sinisme, apriori dan kritik terhadap Deklarasi Jimbaran itu mengindikasikan bahwa persoalan disparitas ekonomi Cina-pribumi, merupakan masalah yang rumit dan mengandung benih-benih konflik. Apalagi banyak fakta menunjukkan minoritas Cina hanya memperkuat polapola otoriterisme di kalangan oknum birokrat.

Di tengah proses pembangunan yang berorientasi pertumbuhan dan banyak ketimpangan didalamnya, ketegangan hubungan antara Muslim dan Cina di Indonesia sampai sekarang terus dirasakan. Sementara di kalangan bisnis dan birokrat, terkesan rendahnya kesadaran bahwa pembangunan merupakan masalah kebudayaan. Mereka masih melihat pembangunan sebagai semata urusan bisnis, dan tidak mempertimbangkan pembangunan sebagai masalah kebudayaan yang berdimensi luas. Pertimbangan bisnis ini telah menimbulkan dampak negatif seperti marginalisasi ekonomi-politik rakyat, penggusuran tanah dan seterusnya, yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial-kemasyarakatan. Dilatarbelakangi oleh realitas yang pahit dan timpang seperti disebut di atas, esai ini bertolak dari sebuah pertanyaan: Mampukah kelas borjuasi Islam menjadi kekuatan pengimbang negara, dengan memperkuat rakyat dalam kerangka “civil society” untuk mengontrol proses pembangunan yang digerakkan oleh negara dan kalangan pengusaha Cina yang relatif sudah sangat kapitalis.

Pemikiran ini bertolak dari suatu “discourse” bahwa dalam beberapa tahun terakhir, muncul suara- suara yang menghendaki agar umat Islam yang kini mulai menyaksikan tumbuhnya kelas menengah santri, sudah waktunya diberi akses ekonomi-politik, ruang gerak dan kebebasan untuk mengembangkan kerjasama dan jaringan dengan kelompok-kelompok non- Islam dalam upaya membentuk “civil society” melalui berbagai prakarsa yang datang



dari luar negeri. Suara-suara itu muncul dengan asumsi bahwa selama negara terus mengontrol, mengawasi dan membatasi ruang gerak umat Islam, maka harapan dan impian akan datangnya “civil society” hanyalah sebuah ilusi. Dan kehendak untuk membangun negara yang kuat dan masyarakat yang juga kuat, dikhawatirkan akan disilusi dan sia-sia.

Kelahiran ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) akibatnya sering dilihat sebagai kebangkitan kelas menengah santri yang semakin artikulatif dan asertif dalam memperjuangkan aspirasi, nilai-nilai dan kepentingan komunitasnya atas nama mayoritas. Dari kalangan ICMI, mencuat desakan pentingnya pemenuhan politik representasi yang proporsional. Kelas menengah Muslim modernis nampaknya merupakan artikulator paling tegas mengenai pentingnya distribusi sumber daya ekonomi dan politik secara adil dan proporsional.

Tantangan lain yang mengemuka di hadapan ICMI adalah masalah disparitas pendapatan dan kesenjangan sosial-ekonomi serta bagaimana memberdayakan ekonomi Islam yang marginal dan terpentak. Dunia masa kini adalah dunia yang penuh kontras dan disparitas (kesenjangan). Ekonomi dunia diorganisir atas dasar hubungan asimetris antara pusat yang dominan (dominant 'center') dan pinggiran yang didominasi (dominated 'periphery'). Antara keduanya terdapat kontras dan disparitas yang dalam. "The disparities are constantly growing. Disparitas/kesenjangan itu terus menerus berkembang, kata Mohammed Bedjaoui (1979), mantan Menteri dan Duta Besar Aljazair di Paris, anggota Komisi Hukum International PBB, dalam *Towards A New International Economic Order*. (Kartjono, 1995)

Kondisi kontras dan disparitas tersebut sering diungkapkan demikian: This is the new form of slavery of modern times' (Ini adalah bentuk perbudakan baru jaman modern), sebagaimana bias kita temui di Indonesia di mana sekitar 27 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Sementara jumlah penduduk yang dapat dikategorikan sebagai golongan menengah Indonesia (dalam perbandingan dengan beberapa negeri Asia lainnya), data tahun 1993 dan proyeksi tahun 1998 dalam juta dan persen dari jumlah total penduduk, adalah sebagai berikut (Kartjono, 1995):

<b>Negara</b>	<b>1993</b>	<b>1998</b>
Indonesia	16,0 (8,5%)	22,0 (10,8%)
Malaysia	4,9 (26,0%)	5,7 (28,0%)
Thailand	3,1 ( 5,3%)	6,0 ( 9,6%)
Korea Selatan	10,1 (23,0%)	12,9 (28,0%)
India	200,0 (23,5%)	310,0 (33,0%)
Cina	64,0 (5,3%)	240,0 (18,6%)

Namun demikian, besarnya perkembangan golongan menengah ke atas itu masih relatif kecil dibandingkan keseluruhan penduduk Indonesia, di mana umat Islam merupakan bagian terbesar di dalamnya. Dan reproduksi kelas kapitalis dan golongan menengah oleh sektor negara maupun swasta itu ternyata mengorbankan ekonomi Muslim, dan peran serta masyarakat bawah. Sekedar ilustrasi, majalah "Forbes" edisi 17 Juli 1995, memasukkan 10 pengusaha Indonesia non-Muslim dan non-pribumi sebagai pengusaha terkaya di dunia. Mereka adalah Liem Sioe Liong (Salim Group) dengan kekayaan US\$4,6 miliar, Eka Tjipta Widjaja (Sinar Mas Group) US\$3,7 miliar, Keluarga Wonowidjojo (Gudang Garam) US\$3,0

miliar, Prajogo Pangestu (Barito Pacific) US\$2,0 miliar, Djuhar Sutanto (Windu Kencana) US\$1,8 miliar, Putra Sampoerna US\$1,7 miliar, Sjamsul Nursalim (Gajah Tunggal) US\$1,3 miliar, Sukanto Tanoto (Garuda Mas Group) US\$1,1 miliar, Mochtar Riady US\$1,1 miliar, Budi Hartono (Rokok Djarum) US\$1,0 miliar. Asset para milyuner itu mengisyaratkan kecepatan dan kehebatan mereka dalam dunia bisnis, yang tak akan bisa ditandingi oleh kaum Muslim pribumi dalam satu atau dua generasi. Namun keberhasilan itu dibarengi dengan pengorbanan besar dari sumberdaya alam, masyarakat bawah dan lapisan yang tak beruntung pada umumnya.

Bahkan menurut Sritua Arief, kira-kira 80 persen dari 140 perusahaan yang sampai tahun 1991 menawarkan saham melalui pasar modal Jakarta dengan kapitalisasi sebesar Rp13 triliun, dimiliki oleh kelompok Tionghoa (nonpribumi). (Arief, 1991)

Dan angka kapitalisasi dan kepemilikan golongan nonpribumi itu terus bertambah besar hingga sekarang. Ilustrasi itu menggambarkan betapa kesenjangan ekonomi sangat sensitif dan tajam dalam era Orde Baru. Sebagaimana kita tahu, ekonomi rakyat memiliki dalam dirinya kelemahan hampir dalam segala hal, baik yang bersifat makro maupun mikro. Misalnya, pada tingkat konseptual, teori, policy negara, strategi pembangunan, akses pada sumberdaya, skalanya yang kecil dan tidak terorganisir, metodologi pengembangan, ketrampilan, permodalan, teknologi, pasar, dan lain-lain sebagainya. Sebaliknya kelompok ekonomi dominan memiliki kekuatan hampir dalam segala hal. Terdapat kontras dan disparitas pula antara kedua kelompok ekonomi tersebut.

Keberhasilan pembangunan di bidang industri skala besar, secara umum telah memberikan gambaran yang kontras antara kapitalis kroni Soeharto dan kaum menengah Islam. Di satu pihak sektor industri telah tumbuh menjadi sektor yang modern meskipun telah mengurus sumberdaya alam secara besar-besaran, tetapi di sisi lain sektor ini tidak banyak memberikan dampak positif bagi ekonomi rakyat. Bahkan yang menyedihkan, kehadiran industri-industri skala besar tersebut dalam kenyataannya banyak mengorbankan industri kecil dan usaha-usaha ekonomi rakyat.

Kemiskinan yang menjadi titik utama perhatian kita merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masalah yang dihadapi penduduk miskin bersifat multidimensi yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan timbul karena ada sebagian masyarakat yang belum ikut serta di dalam proses pembangunan sehingga belum dapat menikmati hasil pembangunan secara memadai.

Keadaan ini disebabkan oleh pemilikan sumber daya dan tingkat produktivitas atau kemampuan menghasilkan dari masing-masing pelaku pembangunan tidaklah sama dan tidak sepenuhnya merata. Perbedaan dalam produktivitas menyebabkan kecenderungan masyarakat yang mempunyai produktivitas tinggi akan lebih cepat berkembang dan yang lemah kurang mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Kemiskinan ekonomi bertalian dengan kemiskinan politik dan untuk mengatasi masalah itu, demokrasi adalah suatu keharusan. (Sumodiningrat, 1995)

Dalam hal ini, pemberdayaan umat Islam dan kelas saudagar Muslim tak bisa dilepaskan dari upaya ICMI untuk memberdayakan ekonomi rakyat di era Orba Soeharto, namun capaian yang dihasilkan tetap masih buruk.

Dalam catatan penulis, beberapa kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kalangan pers dan mahasiswa menghadapkan pertanyaan bagi ICMI sebagai berikut: Pertama, Sejauh ini apa pendekatan dan masukan (input) bagi ICMI dari bawah sebagai masukan bagi

pemerintah? Apa masukan dan pendekatan dari atas? Seberapa jauh komitmen ICMI pada demokrasi, kemanusiaan dan keadilan bisa diwujudkan sesuai mandat konstitusi UUD 1945? Dan bagaimana mekanismenya? Apa tantangan dan kendala internasional maupun nasional yang mendesaknya? Kedua, Bagaimana nasionalisme kita di masa depan dengan melihat situasi ekonomi-politik dewasa ini yang kian mengalami konglomerasi? Ketiga, Bagaimana dengan

pendekatan sosial-budaya kita dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil-makmur dalam Negara Pancasila? Keempat, Apa kendala rakyat untuk hidup berdemokrasi? Bagaimana dengan Rule of Law kita dewasa ini untuk mewujudkan Negara Hukum? Kelima, Adakah pendekatan baru yang efektif/efisien dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat? Bagaimana sikap ICMI terhadap UU antimonopoli dan "law enforcement" untuk melindungi usaha menengah dan kecil dewasa ini? Apakah kita perlu meninjau kembali paradigma pembangunan kita? Lalu apa paradigma baru bagi pembangunan itu? Dan sebagainya.

Pembangunan atau modernisasi telah mendatangkan kemajuan sekaligus persoalan dan tantangan. Kesenjangan ekonomi dan sosial adalah salah satu bentuk krisis dari developmentalisme kita selama lebih tiga dekade, di tengah proses pembangunan yang cepat dan masiv.

Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa keberhasilan modernisasi Orde Baru telah dicapai, namun kelemahan-kelemahannya memerlukan koreksi yang cermat dan mendalam. Fenomena konglomerasi ekonomi dan konglomerasi politik, tak bisa diremehkan begitu saja. Konglomerasi itu harus dilihat dari sisi sosial-budaya dan ekonomi-politik. Ia kuat berdampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Konglomerasi itu berpengaruh kepada nasionalisme baru yang kita tumbuhkan bersama. Tentang konglomerasi ekonomi dan politik itu, kita perlu merenung dan berpikir kembali mengenai kehadiran bisnis raksasa itu dilihat dari sisi konstitusi. Bagaimanapun UUD 1945 merupakan kesepakatan kita bersama dalam mengelola ekonomi Indonesia. Sehingga monopoli dan oligopoli ekonomi-politik jelas tidak sesuai dengan aturan main dalam konstitusi itu. Apalagi bila dikaitkan dengan kenyataan bahwa mayoritas rakyat masih hidup dalam kemiskinan.

Menurut data BPS yang ada, 2/3 rakyat Indonesia miskin. Sedang, di samping itu, demikian Prof. Jamie Mackie dari ANU Canberra, kita melihat adanya 200 konglomerat yang menguasai omset produksi/penjualan mencapai lebih dari 80 persen dari GDP. Keadaan seperti ini adalah yang ditolak oleh pasal 33 UUD 1945.

Hal itu harus kita renungkan kembali. Pada periode 1990-an, demikian Sri Bintang Pamungkas, seorang pakar ICMI, melihat pemerintah seakan-akan mengatakan, bahwa meskipun ada konglomerat, tapi mekanisme pemerintah berhasil menguasai mereka sehingga rakyat banyak memperoleh manfaatnya. Bahkan ada gambaran seakan-akan produk tekstil cukup murah sehingga terjangkau rakyat banyak. Nampak ada kecenderungan kaum birokrat tidak memikirkan, bahwa kalau produk tekstil tidak dikuasai oleh para konglomerat monopolis, maka harga pasar yang lebih kompetitif pasti akan menghasilkan produk yang lebih murah. Demikian pula seandainya terigu dan super mie tidak dimonopoli, maka super mie bisa lebih murah dari 250 rupiah sebungkus harga sekarang. Bayangkan kalau konglomerat super mie mengutip Rp 25 ekstra per bungkus, berapa yang diambil dari hak rakyat?

Konglomerasi, oligopolisme dan monopolisme telah menciptakan inefisiensi dan high cost economy., hingga pada akhirnya menimbulkan distorsi politik, kesenjangan politik dan ketegangan politik.

Para birokrat umumnya juga tidak menyinggung asas kekeluargaan koperasi. Perusahaan besar yang sekarang dikuasai oleh para monopoli- oligopolis dan konglomerat, mestinya juga bisa dimiliki oleh koperasi. Kenyataan menunjukkan bahwa berbagai fasilitas perbankan, kredit murah, bebas pajak, proteksi, dan lain-lain diberikan kepada perorangan, bukan kepada koperasi. Oleh sebab itu, koperasi tidak tumbuh berkembang.

Ada gejala kuat bahwa elite birokrat tidak mempunyai political will untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan dan koperasi. Bahkan koperasi hanya direlakan diberi hibah saham yang tidak ada artinya dari para konglomerat. Seakan-akan setiap orang/kelompok diberi kesempatan yang sama. Padahal kemampuan masing-masing berbeda.

Pemerintahlah yang harus membangun kemampuan rakyat banyak yang mayoritasnya Muslim. Para elite birokrat telah menciptakan liberalisme dengan free-fights sehingga hanya yang kuat dan mampu yang menang. Pasal-33 menolak adanya free-fights. Seharusnya, perusahaan-perusahaan besar itu berbentuk koperasi sedang perusahaan-perusahaan kecil adalah untuk perorangan. Adalah tidak benar pula bahwa pemerintah telah menciptakan mekanisme yang mampu menyedot kekayaan adikuasa ekonomi untuk diratakan.

Mekanisme pajak tidak berlangsung untuk menciptakan pemerataan. Bahkan penguasaan oleh adikuasa-adikuasa perorangan ini telah menyingkirkan sekaligus hak rakyat kecil. Penguasaan hutan yang menyingkirkan para petani pemungut hasil hutan, para penguasa tanah yang menggusur rakyat kecil dari lahannya adalah contoh dari perampasan hak-hak rakyat kecil. Mereka merampas hak-hak rakyat untuk bisa ikut menikmati sumber- sumber kemakmuran di bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya melalui hak-hak yang diberikan oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Menurut Sri Bintang Pamungkas, ada lima hal yang terkandung dalam Pasal 33, Pasal Demokrasi Ekonomi yang patut dijadikan pedoman, tak boleh ada adikuasa ekonomi; pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan; pembangunan daya beli rakyat atas bahan-bahan pokok (seperti sandang, papan, pangan, pendidikan dan kesehatan); membangun kemampuan individu agar mandiri dalam kehidupan ekonomi, dan campur-tangan negara dalam menciptakan keadilan dalam masyarakat (persaingan yang sehat, bukan persaingan bebas). Hanya dengan cara berpikir kritis, kita bisa membayangkan bagaimana membangun masa depan bersama di Indonesia.

Persoalan kesenjangan ekonomi merupakan masalah yang mendesak sebab kesenjangan sosial- politik mudah berurat akar dari isu itu. Dan bukan primordialisme yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional, melainkan ketidakseimbangan dan ketidakmerataan ekonomi. Bukankah disparitas ekonomi akhirnya berwujud pada disparitas politik? Sebagai tambahan, menurut laporan Data Consult DC/ICN no.167,13 Maret 1995, pada tahun 1994 "turn-over" konglomerat Indonesia diperkirakan mencapai US\$86,5 miliar atau Rp 190,3 triliun atau sekitar 57,5 persen GDP Indonesia. Konsentrasi ekonomi ini jelas sangat berpengaruh pada upaya bagi pemberdayaan ekonomi rakyat, demokratisasi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dihadapkan pada persoalan dan tantangan di atas, maka ICMI seyogyanya tak perlu jera dan lelah untuk intropeksi dan mawas diri. Kalau ICMI lupa pada misi sosial-budaya dan ekonomi yang diembannya yakni "amar maruf nahi munkar", demi kemaslahatan bangsa dan negara, maka krisis legitimasi, meminjam istilah Jurgen Habermas, bisa dipastikan akan menghadang peran dan dinamika organisasi cendekiawan ini. Dalam jangka pendek maupun panjang, kegagalan-kegagalan ICMI untuk menjawab persoalan dan tantangan yang dihadapi umat Islam tersebut di atas, dikhawatirkan akan membuat simbol-simbol Islam mengalami

delegitimasi. Jika ini yang terjadi, ada kecemasan bahwa kemunduran besar akan menerjang umat Islam kembali

### **Kapitalisme Ersatz**

Sudah diketahui bahwa kapitalisme ersatz, meminjam bahasa Kunio Yoshihara, sangat menggejala di ASEAN. Sehingga ada keraguan bahwa mereka bisa menjadi kelas borjuasi yang tangguh dan independen, yang pada gilirannya akan memungkinkan demokrasi merebak dan berkembang. Karena itu, diktum Barrington Moore No bourgeoisie, no democracy menjadi diktum populer di kalangan modernis sekuler. Meminjam bahasa Hewison, Robison dan Rodan (1993), tesis Moore itu digugat kembali. Benarkah kalau tak ada kaum borjuasai, maka tak ada pula demokrasi? Dalam beberapa dekade terakhir terbukti kaum kapitalis dan borjuasi tumbuh di ASEAN dalam skala besar yang mengejutkan. Tapi Robison cs justru menekankan bahwa kaum borjuasi, kelas menengah dan demokrasi tidak selalu beriringan dalam sepanjang sejarah. Dalam kenyataan di Asia Tenggara ini, sering kelas menengah dan borjuasi itu justru mendukung status quo dan lebih mengisyaratkan keengganan untuk mewujudkan perubahan, seperti dalam kasus Indonesia dan Malaysia. Dan memang, “real politics” kelas menengah yang mencuat sebagai akibat- berkembangnya konglomerat atau kapitalis ersatz di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, ternyata tidak otomatis mendinamiskan demokratisasi, bahkan memarginalisasi ekonomi Muslim (pribumi) yang merupakan mayoritas rakyat. (Robison & Rodan, 1993) Walaupun dampak dari modernisasi ekonomi itu ada, toh dominasi negara atas masyarakat tidak sertamerta menyusut. Kasus di Singapura dan Indonesia, sekedar ilustrasi, bisa jadi demikian. Robison bahkan melihat ketegangan-ketegangan muncul dan inheren dalam negara Orde Baru sebagai konsekuensi dari “pembangunanisme” selama ini.

Robison berpendapat integrasi Indonesia ke dalam struktur ekonomi kapitalis global dan keterkaitannya kepada persetujuan dan negosiasi internasional, yang mempersulit isolasinya dari arus informasi dan teknologi, akan membuat “dirigiste” dan aspek-aspek organis negara menghadapi tekanan yang menguat. Indonesia, kata Robison, akan sulit mengabaikan tekanan internasional dalam soal hak asasi manusia (HAM). Akan halnya dengan demokrasi, Robison pesimistis, bahwa demokratisasi spontan akan muncul dari masyarakat modern dan rasional Indonesia dalam situasi Orba. Hal itu, kata Robison, akan menjadi perjuangan panjang dan kompleks dengan lembaga kepresidenan dan elit birokrat sebagai pilar utama kehidupan kenegaraan. Dalam persepsinya, negara, angkatan bersenjata dan birokrasi sipil akan tetap menjadi kekuatan politik terpenting di masa dekat dan diperlukan akomodasi lebih lanjut dari berbagai kelompok kepentingan untuk mewujudkan demokrasi yang sejati. Namun demikian, dalam perlu digarisbawahi bahwa peran angkatan bersenjata di Asia Tenggara tetap merupakan pilar yang “powerfull”, meskipun kini menghadapi perubahan internasional yang mengarah kepada menguatnya peran masyarakat madani yang berperadaban (civil society).

### **Krisis Multi Dimensi**

Dengan menyimak uraian di atas nampak bahwa persoalan multi krisis di Indonesia sesungguhnya bersumber dari perusakan secara sistematis dasar- dasar institusional pengelolaan dan distribusi sumber-sumber ekonomi dan politik. Menurut Yoshihara Kunio (1999), di Indonesia, bidang bisnis dan politik, dua institusi yang memiliki prinsip pengaturan yang berbeda, menyatu dan melahirkan bentuk kapitalisme erzats, kolusi-korupsi-kroniisme yang paling buruk dalam sejarah ekonomi kita, bahkan mungkin sejarah ekonomi



dunia. Sementara transparansi dan akuntabilitas publik dalam alokasi sumber ekonomi gagal berkembang dalam dunia bisnis. Akibatnya, meminjam diskursus para ilmuwan sosial, wilayah bisnis di Indonesia tidak dapat berkembang sebagai arena of civilising society, arena pemberadaban masyarakat, sementara modal sosial terkikis dan krisis politik merebak sekitar tahun 1997-1998.

Modal sosial merupakan sumberdaya yang vital untuk menumbuhkan kepercayaan dan keadaban. Suatu kelompok masyarakat disebut memiliki modal sosial bila di dalam dirinya berkembang elemen kepercayaan yang mendorong keija sama antara-anggota untuk mencapai tujuan bersama. Kepercayaan yang dibangun bukanlah mendasarkan diri pada ikatan primordial yang sempit, namun pada ikatan civility seperti penghormatan akan pluralisme dan toleransi. Tanpa adanya kepercayaan sebagai unsur signifikan dalam modal sosial, tidak akan tercapai upaya penghapusan konflik politik para elite maupun massa di tingkat bawah.

Dalam kaitan ini, bisa dibenarkan asumsi di tengah masyarakat bahwa sebagian besar pengusaha dan birokrat yang tumbuh di era Orde Baru, kemudian beralih menjadi politisi di DPR/MPR dan kekuatan oligarki baru di Era Reformasi, merupakan langkah penyelamatan pribadi dari kemungkinan jeratan dan kejaran hukum, rule of law. Di tengah situasi ini, kalangan pengusaha Muslim pribumi tak juga tumbuh kuat.

Sementara para aktivis politik Muslim ideologis dan non-Muslim yang dulu "marginal" secara ekonomi, memasuki arena eksekutif dan legislatif untuk suatu pragmatisme ekonomi-politik, bukan demi panggilan hati nurani guna memberdayakan masyarakat yang mayoritas Muslim dan marginal!

Kinerja lembaga eksekutif dan legislatif yang "sama buruknya" dalam beberapa tahun terakhir membuktikan kebenaran hipotesa ini. Faktanya, jajaran eksekutif maupun legislatif tidak menunjukkan sense of crisis dan sense of urgency, juga tidak bekerja secara efektif, melainkan lebih menonjolkan "vested interest" perebutan kekuasaan/kedudukan, sebagaimana tampak pada kemelut antara presiden dan parlemen di era Abdurrahman Wahid dulu. Dan kompromisme jajaran eksekutif dan legislative yang "tidak mengutamakan dan tidak mementingkan" rakyat terus terjadi di era Megawati, era SBY dan era Jokowi di masa transisi demokrasi ini.

Celaknya pasca era Gus Dur, yakni pada era Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-Kalla), SBY-Boediono dan Jokowi-JK, ada kecenderungan kuat gejala-gejala dan situasi yang tidak kondusif tersebut, muncul kembali, seperti maraknya korupsi-kolusi (kasus E-KTP,BLBI, Centurygate dll), busung lapar, kemiskinan massal dan pembalakan liar yang kian menggurita. Sehingga membuktikan bahwa politik pemberdayaan ekonomi-politik Muslim hanya retorika dari kalangan elite politik dan aktivis reformasi yang kini memperoleh kedudukan di lembaga eksekutif maupun legislatif.

Karena itu, pada akhirnya, pemberdayaan ekonomi Muslim yang otentik dan profetik tak bisa diharapkan dari para elite politik, tak bisa didambakan akan datang dari politics of empowering from above. Melainkan harus diperjuangkan dengan keringat dan darah kaum Muslim sendiri secara terorganisir sebagai agenda papan bawah (politics of empowering from below) dalam suatu pergulatan hidup yang nyata, meskipun pahit dan getir.

Kalangan bisnis dan kelas menengah Muslim pribumi bagaimana meng- inginkan agar duet Presiden Jokowi-Jusuf Kalla (Wapres), yang meng- gantikan SBY-Boediono dewasa ini, bisa tegas dan cepat mengakhiri praktik kejahatan sosial, terutama bagaimana agar program pemberantasan KKN, penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, demi tegaknya keadilan, kemanusiaan, kebebasan, HAM, dan demokrasi era reformasi ini dibarengi dengan "kebijakan

nyata dan jelas visinya” yang mampu menolong rakyat keluar dari krisis ekonomi, kerusakan sosial dan gejala disintegrasi. Sebab dalam periode transisi era Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati- Hamzah Haz dan SBY-Boediono dan Jokowi-JK saat ini, ternyata wacana itu masih "terpisah" dari realitas kehidupan sosial-ekonomi dan kultural rakyat yang sangat menderita dan tertekan oleh multi krisis. Akibatnya, politik rezim saat ini yang bersandar pada wacana, tidak memiliki mesin sosial- ekonomi untuk mewujudkan wacana itu sebagai gagasan sosial yang bisa diimplementasikan secara nyata oleh rakyat, dan akibatnya hanya menjadi “konsumsi politik” dan komoditi para elite maupun kelas menengah yang terpisah dari proses sosial di arus bawah.

Dalam hal ini, pemerintah harus menyadari bahwa membiarkan kemiskinan dan ketidakadilan merajalela di kalangan Muslim, sama halnya menunggu bom waktu bagi ledakan kemarahan dan kekerasan. Inilah kompleksitas persoalan yang harus dipecahkan oleh negara dan masyarakat madani dari semua golongan, ideologi, lapisan dan aliran. Wallahualam

#### **Daftar Pustaka**

- Arief, Sritua, “Perjalanan Nasionalisme Indonesia, Sebuah Tinjauan Kritis,” Prisma, No. 12, Februari 1991.
- Bello, Walden & Malhotra, Kamal, “Taming the Tigers: The IMF and the Asian Crisis,” dalam Jomo K. Sundaram, (ed.), *Tigers in Trouble: Financial Governance, Liberalisation and Crises in East Asia* (London: Zed Books, 1998), h. 85-132.